

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA AKUMULASI				No.	KEGIATAN PENGAWASAN/DUKUNGAN MANAJEMEN		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target			
					TW1	TW2	TW3	TW4			Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI				TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
BIDANG IPP																				
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Efisiensi Keuangan Negara	Rp (juta)	500		250		500	1	Pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	1	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)	5	20.210.000	Korwas IPP		1			
									2	Audit atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	2	Hasil Kegiatan Assurance (audit, reviu, Evaluasi, dan pemantauan) tidak dapat ditindak lanjuti	1	17.330.000	Korwas IPP			1		1
2	Meningkatnya pengawasan pembangunan atas pembangunan nasional	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1				1	1	Pengawasan atas Infrastruktur Jalan Tol	2	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)	7	8.396.000	Korwas IPP	Laporan		1		1
									2	Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)	16		7	56.720.000	Korwas IPP	Laporan	4	4	4	4
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	Presentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	%	80		40%		80%	1	Pengawasan atas Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan Pemilu	3	Rekomendasi Strategis diberikan oleh Tim BPKP tidak relevan dengan kondisi/permasalahan yang ada	14	83.656.000	Korwas IPP	Laporan				3
									2	Pengawasan atas Kinerja Pendidikan Tinggi	1		8	20.760.000	Korwas IPP	Laporan			1	
									3	Pengawasan atas Pembangunan Satu Data Indonesia	1	Temuan Hasil pemeriksaan tidak dapat ditindak lanjuti	8	8.910.000	Korwas IPP	Laporan	1			
									4	Pengawasan atas Bauran Program Kesejahteraan Sosial	4			52.421.000	Korwas IPP	Laporan	1	1	1	1
									5	Pengawasan atas Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	2			25.350.000	Korwas IPP	Laporan		2		
									6	Pengawasan atas Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	2			40.612.000	Korwas IPP	Laporan				2
									7	Pengawasan atas Penguatan Inovasi dan Teknologi Kesehatan (Digitalisasi Layanan Kesehatan)	2			23.800.000	Korwas IPP	Laporan		2		
									8	Pengawasan atas Kemudahan Perizinan Berusaha	2			24.550.000	Korwas IPP	Laporan			2	
									9	Pengawasan atas Skema Kesehatan Adaptif	1			13.000.000	Korwas IPP	Laporan		1		
									10	Pengawasan atas Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	2			20.260.000	Korwas IPP	Laporan	1		1	
									11	Verifikasi atas Capaian Disbursement Linked Indicators (DLI) Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	2			39.190.000	Korwas IPP	Laporan		1		1
									12	Pengawasan atas Pengadaan ASN Tahun 2023	1			8.292.000	Korwas IPP	Laporan				1
									13	Pengawasan atas Tata Kelola Harga Minyak Goreng	1			6.910.000	Korwas IPP	Laporan	1			

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA AKUMULASI				No.	KEGIATAN PENGAWASAN/DUKUNGAN MANAJEMEN		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target				
					TW1	TW2	TW3	TW4			Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI				TW1	TW2	TW3	TW4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
									14	Sistem kesehatan nasional	1			30.640.000	Korwas IPP	Laporan		1			
									15	Pengawasan atas Sarpras Pendidikan	1			11.130.000	Korwas IPP	Laporan			1		
									16	Pengawasan atas Akuntabilitas penanganan Covid-19	3			24.422.000	Korwas IPP	Laporan	3				
									17	Pengawasan atas Reformasi sistem kesehatan - layanan primer	1			12.630.000	Korwas IPP	Laporan		1			
									18	Pengawasan atas Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	1			12.110.000	Korwas IPP	Laporan		1			
									19	Pengawasan atas Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes	1			12.730.000	Korwas IPP	Laporan		1			
									20	Pengawasan atas Bantuan Operasional Sekolah	2			26.410.000	Korwas IPP	Laporan			2		
									21	Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023	2			25.338.000	Korwas IPP	Laporan		2			
									22	Pengawasan Tata Kelola Peredaran Obat	1			9.110.000	Korwas IPP	Laporan	1				
									23	Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Limbah Setempat	1			8.230.000	Korwas IPP	Laporan				1	
									24	Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Minum Perdesaan	1			8.040.000	Korwas IPP	Laporan				1	
									25	Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah (PISEW)	1			7.780.000	Korwas IPP	Laporan			1		
									26	Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) - 1	1			7.110.000	Korwas IPP	Laporan			1		
									27	Pengawasan atas Pembangunan Bandara	2			10.140.000	Korwas IPP	Laporan		1		1	
									28	Pengawasan atas Infrastruktur SPAM	2			33.656.000	Korwas IPP	Laporan		1		1	
									29	Pengawasan atas Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi	2			13.150.000	Korwas IPP	Laporan		1		1	
									30	Pengawasan atas Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan Sanitasi	2			15.290.000	Korwas IPP	Laporan			2		
									31	Pengawasan atas Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata	1			33.448.000	Korwas IPP	Laporan	1				
									32	Pengawasan atas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	1			37.872.000	Korwas IPP	Laporan	1				
									33	Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM	1			39.652.000	Korwas IPP	Laporan	1				
									34	Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)	1			24.340.000	Korwas IPP	Laporan	1				
									35	Pengawasan atas Dukungan Pengembangan Pariwisata	1			23.040.000	Korwas IPP	Laporan	1				
									36	Pengawasan atas Penanggulangan Hama dan Penyakit	1			9.920.000	Korwas IPP	Laporan			1		
											76			906.555.000				18	22	17	19

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA AKUMULASI				No.	KEGIATAN PENGAWASAN/DUKUNGAN MANAJEMEN		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target															
					TW1	TW2	TW3	TW4			Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI				TW1	TW2	TW3	TW4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25												
BIDANG APD																																
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2.494	2.494				1	Optimalisasi PAD	4	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder	2	96.580.000	Korwas APD	Laporan	4															
																					Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	134.612	134.612				184	1	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	3	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)
		1	Pelaksanaan Evaluasi PA PBJ	4	66.720.000	Korwas APD	Laporan	1	1	1	1																					
												3	Pengawasan atas Implementasi Bansos APBD	1	16.680.000	Korwas APD	Laporan	2	2	2												
		4	Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	8	66.720.000	Korwas APD	Laporan	2	2	2	2																					
5	Pengawasan atas Efektivitas Dana Transfer Umum											1	16.680.000	Korwas APD	Laporan			1														
		Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	184				184	1	Pengawasan atas Akuntabilitas penanganan Covid-19 (Inakesda)	2									Hasil kegiatan Assurance (audit, reviu, evaluasi, dan Pemantauan) tidak dapat tindak lanjuti	1	4.460.000	Korwas APD	Laporan	2							
2	Evaluasi Pengembangan Ekonomi Wilayah Selatan DIY											1	34.960.000	Korwas APD		1	1															
		2	Evaluasi Program Jogja Smart Province (JSP)	1	34.960.000	Korwas APD		1	1																							
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP											Presentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	%	80				80	1	Pengawasan atas Percepatan Penurunan Stunting	2	Rekomendasi Strategis diberikan oleh Tim BPKP tidak relevan dengan kondisi/permasalahan yang ada	14	45.780.000	Korwas APD		2					
		2	Pengawasan atas Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	2	54.460.000	Korwas APD				2																						
																															3	Pengawasan atas Produktivitas dan Daya Saing UMKM
		4	Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)	2	11.990.000	Korwas APD		2																								
											5																				Program Pembangunan Perumahan Rakyat	1
		6	Pengawasan atas Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	9.400.000	Korwas APD			1																							
											7																				Pengawasan atas Dukungan Pengembangan Pariwisata	2
		8	Pengawasan atas Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata	2	3.000.000	Korwas APD		2																								
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional										Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi Nasional	Kegiatan Prioritas Daerah	2	1	2																	
		1	Evaluasi Pengembangan Ekonomi Wilayah Selatan DIY	1	34.960.000	Korwas APD		1	1																							
2	Evaluasi Program Jogja Smart Province (JSP)										1	34.960.000	Korwas APD		1	1																
		3	Pengawasan atas Percepatan Penurunan Stunting	2	45.780.000	Korwas APD		2																								
2	Pengawasan atas Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem										2	54.460.000	Korwas APD			2		2														
		3	Pengawasan atas Produktivitas dan Daya Saing UMKM	2	29.850.000	Korwas APD		2																								
4	Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)										2	11.990.000	Korwas APD		2																	
		5	Program Pembangunan Perumahan Rakyat	1	9.400.000	Korwas APD			1																							
6	Pengawasan atas Pembangunan Jalan dan Jembatan										2	9.400.000	Korwas APD			1		1														
		7	Pengawasan atas Dukungan Pengembangan Pariwisata	2	18.800.000	Korwas APD		2																								
8	Pengawasan atas Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata										2	3.000.000	Korwas APD		2																	

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA AKUMULASI				No.	KEGIATAN PENGAWASAN/DUKUNGAN MANAJEMEN		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target					
					TW1	TW2	TW3	TW4			Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI				TW1	TW2	TW3	TW4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Prov	1			1		9	Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1			16.680.000	Korwas APD			1				
		Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/kota	11			11		10	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Rujukan)	1			9.400.000	Korwas APD			1				
		Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Prov	1			1		11	Pengawasan atas P3DN	2			37.600.000	Korwas APD			2				
		Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/kota	5			5		1	Evaluasi Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah	1	Auditi menolak/membatasi penugasan pengawasan(audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan)	1	244.560.000	Korwas APD				1			
		Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	9		4	9		1		Stakeholder tidak siap	1				Korwas APD				1		
		Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25		20	25		5							Korwas APD					5	
		Jumlah Desa yang mengelola keuangannya akuntabel	Desa	25		20	25		2		Pengawasan atas Pengelolaan Risiko Sektor Strategis Nasional	4				66.720.000	Korwas APD			2	2	
										1	Konsultasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal	1	9.400.000	Korwas APD			1			
										2	Pengawasan atas Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah	1	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)	1	1.000.000	Korwas APD				1		
										3	Bimtek Implementasi FMIS Pada Pemda	1	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal	1	41.780.000	Korwas APD				1		
										1	Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Desa	8	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)	1	133.440.000	Korwas APD		2	2	2	2	
										2	Pengawasan atas Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	2			33.360.000	Korwas APD		2				
										3	Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	2	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal	1	100.000.000	Korwas APD			1	1		
										4	Pengawasan atas Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES)	2			9.400.000	Korwas APD			1	1		
										5	Pengawasan atas Implementasi Bansos APBDesa	2	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan	1	34.100.000	Korwas APD					2	
								1	Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset Desa	4	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance	1	37.600.000	Korwas APD			2		2			
								2	Pengawasan atas Akuntabilitas Aset Desa	2			33.360.000	Korwas APD			2					
											91			1.338.840.000			21	27	31	12		

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA AKUMULASI				No.	KEGIATAN PENGAWASAN/DUKUNGAN MANAJEMEN		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target			
					TW1	TW2	TW3	TW4			Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI				TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
BIDANG INVESTIGASI																				
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (juta)	1.640,00		1.640			1	Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah: - Audit Penyesuaian Harga	2	Terjadinya kesalahan menentukan jumlah klaim/eskalasi/kerugian keuangan negara	5	34.259.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan		2		
		Nilai Penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (juta)	56.500	180	230		56.500	1	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan: - Audit Investigasi -PKKN - Pemberian Keterangan Ahli - Audit Tujuan Tertentu	8	Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak selesai tepat waktu	13	90.848.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan	2	1	4	1
										Temuan tidak dapat diterima oleh Auditor		1								
										Tim audit gagal dalam mendapatkan bukti (cukup, kompeten dan relevan) dan menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara		7								
										Ahli gagal meyakinkan majelis hakim di dalam pemberian keterangan ahli		3								
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Persentase Hambatan Pelaksanaan yang Diselesaikan	Persen	85		85			1	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan: - Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan	1	Tidak terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang dimediasi dalam menyikapi permasalahan yang ada	3	9.200.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan			1	
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	%	80			80	1	Pengawasan atas akuntabilitas pengadaan logistik dan penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT)	3	Rekomendasi Strategis diberikan oleh Tim BPKP tidak relevan dengan kondisi/permasalahan yang ada	14	26.310.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan	1		1	1	
								2	Pengawasan atas suplay chain komoditas pangan	1			33.680.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan			1		
								3	Pengawasan atas penanganan pasca panen	1			6.450.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan			1		
								4	Pengawasan atas P3DN	4			57.359.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan	1	1	1	1	
								5	Pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemilu	1			12.120.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan	1				
								6	Pengawasan atas Transformasi data menuju regsosek	2			12.380.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan			1	1	
								7	Pengawasan atas bauran program kesejahteraan sosial	4			41.600.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan		2	1	1	
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100			100	1	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan: - Audit Investigasi -PKKN		Ahli gagal meyakinkan majelis hakim di dalam pemberian keterangan ahli	3		Korwas Bidang Investigasi	Laporan					

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA AKUMULASI				No.	KEGIATAN PENGAWASAN/DUKUNGAN MANAJEMEN		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target				
					TW1	TW2	TW3	TW4			Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI				TW1	TW2	TW3	TW4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	85		75	80	85	1	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan: - Coaching klinik - Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi - Bimtek Fraud Control Plan - Bimtek Fraud Risk Assessment	4	Fraud Control Plan (FCP) sudah diterapkan tetapi gagal mendeteksi kecurangan Hasil Kegiatan bimtek tidak diimplemenyasikan mitra kerja FCP Gagal diterapkan	11	35.170.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan		1	2	1	
		Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	3			3		1	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan: - Peningkatan IEPK Pemda	6	Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak selesai tepat waktu	11	27.600.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan		6			
		Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	1			1		1	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan: Peningkatan IEPK Badan usaha	1	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan consulting (bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi)	17	9.200.000	Korwas Bidang Investigasi	Laporan				1	
											38			396.176.000				5	14	13	6
BIDANG AKUNTAN NEGARA																					
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	1		1			1	Pengawasan atas Infrastruktur SPAM - D405	1	Rekomendasi/temuan pengawasan/evaluasi tidak memberikan nilai tambah/perbaikan bagi stakeholder	14	7.800.000	Koorwas AN	Laporan		1			
										Pengawasan atas Pembangunan Bandara - D402	1	Laporan hasil pengawasan terlambat disampaikan	11	9.680.000	Koorwas AN	Laporan		1			
										Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan) - D402	1	Laporan hasil pengawasan terlambat disampaikan	11	7.520.000	Koorwas AN	Laporan	1				
2	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	%	80				80	1	Pengawasan atas Akuntabilitas BUMD Jasa Air - Evaluasi Kinerja PDAM	11	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder	3	1.230.000	Korwas AN	Laporan		5	6		
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1				1	1	Pengawasan atas BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	1	Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	5	5.700.000	Korwas AN	Laporan		1			
										Pengawasan atas Kinerja Perguruan Tinggi - D405	1	Rekomendasi strategis diberikan oleh tim BPKP tidak relevan dengan kondisi/permasalahan yang ada	14	19.930.000	Koorwas AN	Laporan				1	
										Pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu - D402	1	Rekomendasi strategis diberikan oleh tim BPKP tidak relevan dengan kondisi/permasalahan yang ada	14	9.670.000	Koorwas AN	Laporan			1		
										Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat - D401	2			30.400.000	Koorwas AN	Laporan			2		
										Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM - D403	1			5,750,000	Koorwas AN	Laporan				1	
										Pengawasan atas BUMN - D402	1	Temuan hasil pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti	8	5.780.000	Koorwas AN	Laporan				1	
										Pengawasan atas BUMN - D401 A	1			19.890.000	Koorwas AN	Laporan		1			

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA AKUMULASI				No.	KEGIATAN PENGAWASAN/DUKUNGAN MANAJEMEN		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target				
					TW1	TW2	TW3	TW4			Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI				TW1	TW2	TW3	TW4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11			11		1	Pengawasan atas Akuntabilitas BUMD Jasa Air - Evaluasi Kinerja PDAM	11	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder	3	6.000.000	Korwas AN	Laporan		5	6		
									2	Pengawasan atas Akuntabilitas BUMD Aneka Usaha	1	Laporan hasil pengawasan terlambat disampaikan	11	5.980.000	Korwas AN	Laporan	1				
		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2				2		1	Pengawasan atas BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	4	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)	1	44.457.000	Korwas AN	Laporan		2	2	
										2	Pengawasan P3DN pada BLU/D dan BUMD - D405	2	Laporan hasil pengawasan terlambat disampaikan	11	17.250.000	Korwas AN	Laporan		1		1
										3	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan- D405	1	Laporan hasil pengawasan terlambat disampaikan	11	17.000.000	Korwas AN	Laporan		1		
										4	Pengawasan atas Sistem Kesehatan Nasional - D405	1	Laporan hasil pengawasan terlambat disampaikan	11	17.000.000	Korwas AN	Laporan		1		
		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	35				35	1	Pengawasan atas Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUM Desa	2	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder)	7	6.311.000	Korwas AN	Laporan					2
		Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	10				10	1			Laporan hasil pengawasan terlambat disampaikan	11								
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	1				1	1	Pengawasan atas Akuntabilitas BUMD Jasa Air - Evaluasi/Bimtek MRI BUMD	2	Tim tidak dapat menemukan AOI/kelemahan penerapan GCG/MR/Satuan Pengawas Internal/Sistem Pengendalian Internal	17	10.170.000	Korwas AN	Laporan			1		1
		Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	5				5	1	Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan	7	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal	5	105.840.000	Korwas AN	Laporan		2	5		
		Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	2				2	1	Pengawasan atas Akuntabilitas BUMD Jasa Air - Bimtek/Evaluasi Kapabilitas SPI BUMD	2	Stakeholder tidak siap	3	8.000.000	Korwas AN	Laporan		2			
		Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLUD	1				1	1	Pengawasan atas BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	2	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder	3	23.160.000	Korwas AN	Laporan		2			
										57				378.768.000			2	26	22	7	
BIDANG P3A																					
1	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	%	80				80	1	Bimtek/Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah	12	Rekomendasi Strategis diberikan oleh Tim BPKP tidak relevan dengan kondisi/permasalahan yang ada	14	79.482.000			4	4	4		

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA AKUMULASI				No.	KEGIATAN PENGAWASAN/DUKUNGAN MANAJEMEN		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target				
					TW1	TW2	TW3	TW4		Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI	TW1				TW2	TW3	TW4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	APIP	1				1	2	Peningkatan Kualitas Pengelolaan JFA	12	Hasil kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakholder)	11	19.854.000	Korwas P3A	Laporan	4	4	4		
		Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	APIP	11				11	3	Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (SISWASKEUDES)	2			9.927.000	Korwas P3A	Laporan		1			1
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	87				87	10	Pengawasan Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan (PAEP)	10	Penyusunan laporan Internal (bulanan/triwulanan) tidak tepat waktu	1	150.000.000	Korwas P3A	Laporan	2	3	2	3	
		Prosentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100			50	100					7				Dokumentasi pemenuhan evaluasi sakin tidak lengkap	7			
									4	Penyelenggaraan SPIP dan MR	4	Terlambatnya penyelesaian rencana tindak pengendalian yang telah direncanakan dan disepakati Pemilik risiko	7	-	Korwas P3A	Laporan	1	1	1	1	
											40		40	259.263.000				11	13	11	5

BAGIAN TATA USAHA																				
1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75				75	1	Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan;	4	Pemotongan anggaran	3	20.700.000	Sub Koordinator RT	Laporan	1	1	1	1	
								2	Gaji dan Tunjangan;	12	Keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK)	1	25.960.403.000	Sub Koordinator Keuangan	Kegiatan	3	3	3	3	
								3	Penyelenggaraan RB dan ZI;	1	Dokumentasi Pemenuhan ZI tidak lengkap	14	82.100.000	Kabag Umum	Laporan				1	
								4	Penyusunan Bahan Perencanaan, RKT dan Perkin;	1			84.150.000	Korwas P3A	Laporan				1	
								5	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan;	3	Kegiatan dukungan tidak selesai tepat waktu	3			Korwas P3A	Laporan	1	1	1	
									Penyusunan Laporan KLPBU	1					Sub	Laporan				1
	6	Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	1				Korwas P3A	Laporan				1								
	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95				95	1	Penyusunan RKA dan Revisi;	1	Kesalahan pembebanan anggaran pada kegiatan lain	1	183.600.000	Sub Koordinator Keuangan	Dokumen DIPA					1
								2	Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran	1	Penggelapan	3		Sub Koordinator	Laporan				1	
	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80				80	1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor;	12	Pemotongan anggaran	3	3.196.765.000	Sub Koordinator	Kegiatan	3	3	3	3	
								2	Kegiatan layanan Umum	12	Pemotongan anggaran		91.980.000	Sub Koordinator	Kegiatan	3	3	3	3	
								3	Pengadaan Barang dan Jasa	1	Pemotongan anggaran	3	100.000.000	Sub Koordinator Peng. BMN, RT dan Kearsipan	Kegiatan				1	
				Pegawai menerima suap terkait proses pengadaan	10															
	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70				70	1	Penyelenggaraan SPIP dan MR	1	Rencana tindak pengendalian yang ditetapkan belum mampu menurunkan level risiko dibawah selera pemilik risiko	11	25.000.000	Kabag Umum	Laporan					1
								2	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;	1	Keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK)	1	45.000.000	Sub Koordinator Kepegawaian	Laporan				1	
3								Penilaian Angka Kredit;	2	Keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK)	1	Sub Koordinator Kepegawaian		Laporan		1			1	

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA AKUMULASI				No.	KEGIATAN PENGAWASAN/DUKUNGAN MANAJEMEN		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target			
					TW1	TW2	TW3	TW4			Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI				TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
									4	Peningkatan kompetensi pegawai;	1	Pemotongan anggaran	1	15.000.000	Sub Koordinator	Laporan				1
		Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks skala 100	75				75	1	Kegiatan Koordinasi/Monitoring/Evaluasi Kegiatan Pengawasan dan Manajemen Pengawasan	1	Respon terhadap permintaan layanan belum memenuhi kebutuhan pengguna	11	126.675.000	Kabag Umum	Kegiatan				1
											56			29.931.373.000			11	12	11	22
										Total	358			33.210.975.000			68	114	105	71